

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Kadir muhammad,2014, ” hukum perdata indonesia”, PT citra aditya bhakti. Bandung,

Ahmadi Miru, 2013, “hukum kontrak dan perancangan kontrak”, PT raja grafindo persada, jakarta,

Asih eka putri, 2014, ”paham jkn jaminan kesehatan nasional”, (friedrich-ebert-stiftung)

Chazali h situmorang,2013, ”reformasi jaminan sosial indonesia”, transformasi BPJS, (depok cinta indonesia)

Mariam daru badruzaman, 1996 KUHPperdata buku III, hukum perikatan dengan penjelasan alumni, bandung,

Mariam darius, 2005 “aneka hukum bisnis”

Munir fuady, 2002, ”pengantar hukum bisnis” PT citra aditya bhakti, bandung,

Muhammad syaifudin,2012 “hukum kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori,dogmatik,dan pratik hukum (segi pengayaan hukum perikatan) penerbit cv mandar maju bandung.2012

Ricardo simanjuntak,2011, ”hukum kontrak teknik perancangan kontrak bisnis”, (jakarta, kontang publishing,

Salim hs,2008, ” hukum kontrak, teori dan teknik penyusunan kontrak, jakarta ,sinar grafika,

Salim hs, 2004 ,”hukum kontrak teori , penyusun kontrak jakarta sinar grafika

- Salim hs,2001,”pengantar hukum perdata tertulis”, (jakarta sinar grafika)
- Salim hs, 2017,”perancangan kontrak dan memorandum of understanding” sinar grafika,
- Suharnoko,2004 “hukum perjanjian teori dan analisa kasus” jakarta kencana
- Soetjoon prawirohamidjojo,1984 , hukum perikatan (surabaya bina ilmu)
- Sudikno, 2008, “ilmu hukum” lyberti, yogyakarta.
- Tim pustaka yustisia,2014 “kutipan panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan dari bpjs “(jakrta visi media)
- Vladimir rys,2011, “merumuskan ulang jaminan sosial kembali ke prinsip prinsip dasar “ jakarta alvabet
- Zaeni asyhadie,2008, “hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya di indonesia “jakarta PT raja grafindo persada
- Zaeni asyhadie , 2007,” aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di indonesia, rajawali pers mataram,

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

- Kitab undang undang KUHPerduta pasal penerbit permata press
- Undang-undang no 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan republik indonesia
- Undang-undang no 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik indonesia
- Peraturan presiden republik indonesia no 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan republik indonesia
- Peraturan jaksa agung RI tentang Standar operating prosedur pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang, perdata dan tata usaha negara, peraturan jaksa agung NO: PER-/36/A/JA/09/2011

SUMBER LAIN

[https://www.jamsosindonesia.com /bpjs/view/](https://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/)

Rudiansya, 2021, "eksistensi kejaksaan republik indonesia setelah berlakunya uu no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara "jurnal intelektual keislaman sosial, dan sains, vol.10 no 1 hlm 155

<https://www.bpjs-kesehatan.go.id>

himpunan petunjuk jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara(jam datun),
XXXII,penerbit,kejaksaan agung R.I. H.2